



Penyelewengan Hambat Serapan Anggaran

Anggaran Jakarta baru terpakai 20 persen.

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa anggaran pembangunan di Ibu Kota baru sedikit terpakai meski tahun anggaran memasuki bulan keenam. Penyebabnya, kata dia, masih banyak penyelewengan di tingkat para pengguna, yakni satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Penyelewengan-penyelewengan itu membuat pemakaian anggaran dan kinerja setiap SKPD tak efektif. "Masih banyak yang mencoba *mark up* anggaran," ujarnya di Balai Kota kemarin. Dalam evaluasi tim Gubernur, penggelembungan anggaran terjadi di hampir semua proyek.

Basuki mencontohkan anggaran di Dinas Pendidikan dalam pembangunan sekolah. Ada tiga sekolah yang kegiatan belajar-mengajarnya memakai satu gedung secara bergiliran, tapi dalam anggaran operasional tercatat tetap untuk tiga gedung. "Pengerjaannya juga sengaja ditambahkan supaya pejabatnya mendapat komisi banyak," katanya.

Karena itu, Basuki telah memotong anggaran di Dinas Pendidikan sebanyak 18 persen. Tahun ini Dinas Pendidikan mendapat anggaran Rp 15,4 triliun. "Baru satu dinas saja dihemat anggarannya sangat besar. Gila, kan?" ucapnya.

Pada Senin lalu, dalam pidato Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo mengkritik rendahnya serapan anggaran di Ibu Kota. "Per hari ini penyerapannya baru 20 persen," ujarnya.

Menurut Tjahjo, rendahnya penyerapan anggaran tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika anggaran lambat, kata dia, pemerataan pembangunan terganggu. "Tahun lalu anggaran Jakarta hanya terserap 40 persen," ujar Tjahjo. "Ini harus menjadi perhatian."

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengungkapkan data yang lebih kecil lagi. Berdasarkan catatan kantornya, anggaran terserap hingga Juni baru 9,98 persen dari total Rp 69,2 triliun.

Tjahjo memberi target Gubernur Basuki menghabiskan anggaran untuk pembangunan pada akhir tahun sebesar 75 persen. Ia mengatakan Basuki tak perlu cemas anggaran tersebut dikorupsi jika dibelanjakan untuk pembangunan. "Seorang pemimpin kan harus tahu bagaimana melaksanakan tugas membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat pada hukum," ucapnya.

Heru optimistis target tersebut bisa tercapai. Para pengguna anggaran, kata dia, sudah mendapat penjelasan memakai anggaran sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan pada awal tahun. Setiap dinas juga sudah memasang target yang sesuai dengan

harapan Menteri Dalam Negeri.

Sejauh ini dinas yang paling aktif membelanjakan anggaran adalah dinas yang anggarannya diutamakan, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pendidikan. "Sayangnya, belanja modal kita masih rendah, baru 2,2 persen," ucap Heru.

Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memprediksi semua pengerjaan proyek infrastruktur atau program DKI sulit diselesaikan dalam waktu setengah tahun. "Kalau fisik atau infrastruktur, lelangnya saja bisa tiga bulan. Apa proyek selesai tiga bulan?" katanya.



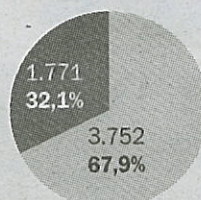
TERENDAH SEPANJANG SEJARAH

Tahun 2014 merupakan tahun terendah dalam penyerapan anggaran pembangunan.

Dari anggaran Rp 63 triliun



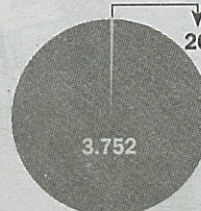
Paket proyek yang masuk lelang



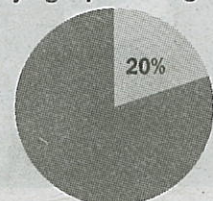
Target pendapatan Rp 72,9 triliun



Paket kegiatan



Proyek pembangunan fisik yang dapat dilelang



■ Target
■ Realisasi